

REFORMASI POLRI
MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum)

I. Later Belakang Historis

Memotret keberadaan Polri, ada baiknya jika mene-lusurinya barang sejenak sejarah Polri dari awal hingga lepasnya Polri dari ABRI (TNI). Penelurusan historis ini penting, yaitu seperti yang pernah dikemukakan oleh Sidi Gazalba, bahwa *The past has much to tell us about the presen*.

Dalam hubungan ini, Koesparmono Irsan (1995: 10-11) pernah mengemukakan, bahwa secara *de facto* Polri (pada waktu itu istilah Polisi Negara RI (Polri) masih belum dikenal) telah ada sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 dan telah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan secara langsung melawan penjajahan Jepang. Akan tetapi secara *de jure*, Polri lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan, bahwa organ Polisi yang ada ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri sebagai Jawatan Kepolisian Negara Administratif.

Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun operasional. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 D Tahun 1946 tanggal 1 Juli 1946, Polri harus langsung berada di bawah Perdana Menteri, sehingga keberadaannya sederajat dengan Kejaksaan dan Kehakiman. Dengan demikian, secara kelembagaan dan struktur organisasi Pemerintah, Polri adalah setingkat Departemen, sehingga kedudukan Kepala Polisi setingkat dengan Menteri.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi itu, Polisi mampu berkembang dengan baik, mampu menata organisasinya secara nasional dengan baik pula, dan secara operasional mampu memacu profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sampai ke sektor Kecamatan, bahkan pelosok-pelosok terpencil.

Namun dalam perjalanan sejarah Polri berikutnya, ternyata telah mengalami berbagai tantangan. Hal itu disebabkan oleh situasi revolusi pada

waktu itu yang mengakibatkan banyak sekali perubahan-perubahan di tubuh Polri, yaitu seperti :

1. Polisi Negara dimiliterisasikan berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112 pada tanggal 1 Agustus 1947. Di mana Polisi Negara mempunyai kedudukan sebagai tentara dan kesatuan Polisi diperintah kembali untuk menjalankan pekerjaan tentara atas perintah komando tentara, sedangkan di garis belakang tetap melakukan tugas-tugas kepolisian di bawah kendali Kementerian Pertahanan.
2. Pada tanggal 19 Juli 1949, polisi bergabung dengan Polisi Pemerintahan Militer (PPM), yaitu gabungan antara Polisi Negara dan CPM. Badan ini berada di bawah kendali Menteri Pertahanan Koordinator Keamanan.
3. Pada tanggal 17 Agustus 1950, terbentuk Negara Kesatuan dan Polisi Negara RI dilebur menjadi satu kesatuan yang berpusat di Jakarta.
4. Keppres No. 154/1959 tanggal 10 Juli 1959: Kepolisian Negara dimasukkan dalam bidang Keamanan/Pertahanan dikepalai oleh Menteri Muda Kepolisian.
5. Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI, tanggal 26 Agustus 1959, nama kementerian diganti Departemen, sehingga Jawatan Kepolisian Negara diganti menjadi Departemen Kepolisian Menteri.
6. Kepres No. 12/1960: Departemen Kepolisian dimasukkan dalam bidang Keamanan Nasional, bersama dengan Menteri/Kastaf Angkatan Laut, Darat, Udara dan Menteri Jaksa Agung dan Menteri Urusan Veteran.
7. Peraturan Menteri/Kasak/No. 2/PRT/MK/1962, tanggal 11 November 1962, Kepolisian Negara diubah menjadi Angkatan Kepolisian RI dengan disertai perubahan susunan staf dan pola organisasinya (AKRI).
8. Kepres RI No. 134/1962, tanggal 12 April 1962, Menteri diubah menjadi Menteri/Kastaf Angkatan Kepolisian Negara, kedudukannya disesuaikan sebagai angkatan bersenjata.
9. Kepres No. 290/1964, tanggal 12 November 1964, AKRI berinteraksi penuh sebagai ABRI. Kepalanya disebut Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak), dan kemudian AKRI menjadi Kepolisian Negara RI (Polri) sampai sekarang ini.

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, bahwa sebenarnya Polri sekarang pada awalnya lahir sebagai Angkatan Bersenjata atau Kesatuan